



fintech indonesia NEWSCORNER



Bulan
Fintech
Nasional
2023



Indonesia
Fintech
Summit &
Expo
2023



TOPIK PEMBAHASAN

Key Message IFSE 2023

- Laporan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, OJK
- Perkembangan Industri Jasa Keuangan Secara Umum Pasca UU P2SK

HIGHLIGHT

- Peluncuran *Guideline of Associations Code of Conduct: Responsible and Trustworthy Use of AI in the Financial Services Sector*
- Peluncuran *Insurtech White Paper: Overview of InsurTech Business Model Implementation in Indonesia: Challenges, Opportunities, and Suggested Discussion Points for Policy Development*

Fintech Outlook 2024

Charting The Course: Indonesia Fintech 2024 And Beyond

DAFTAR ISI

Hari Pertama Indonesia Fintech Summit & Expo 2023

- **OPENING SPEECH: LAPORAN KEGIATAN INDONESIA FINTECH SUMMIT & EXPO (IFSE) 2023.....1**
- **FINTECH VISIONARY SPEECH: CHARTING INDONESIA'S PATH TOWARDS A RESILIENT DIGITAL ECONOMY THROUGH STRONG DOMESTIC FOUNDATION.....2**
- **KEYNOTE SPEECH: PERKEMBANGAN INDUSTRI JASA KEUANGAN SECARA UMUM PASCA UNDANG-UNDANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UU P2SK).....3**
- **SEREMONIAL PROSESI PEMBUKAAN IFSE 2023.....4**
- **SEREMONIAL PELUNCURAN GUIDELINE OF ASSOCIATIONS' CODE OF CONDUCT: RESPONSIBLE AND TRUSTWORTHY USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR.....5**
- **SPECIAL PANEL DISCUSSION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES: NEXT GENERATIONS OF FINANCIAL TECHNOLOGY.....6**
- **PANEL DISCUSSION #1: THE FUTURE OF CAPITAL MARKETS: PREDICTIONS AND TRENDS: INTEGRATING VIRTUAL REALITY (VR) AND AUGMENTED REALITY (AR) IN TRADING.....8**
- **SEREMONIAL PELUNCURAN INSURTECH WHITE PAPER OVERVIEW OF INSURTECH BUSINESS MODEL IMPLEMENTATION IN INDONESIA: CHALLENGES, OPPORTUNITIES AND SUGGESTED DISCUSSION POINTS FOR POLICY DEVELOPMENT.....9**
- **HARD TALK #1: SCALING-UP COLLABORATION AMONG DIGITAL FINANCIAL TECHNOLOGY INNOVATION AND INSURANCE COMPANIES TO ENHANCE FINANCIAL INCLUSION.....10**
- **SEREMONIAL PENANDATANGANAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) ANTARA AFTECH DENGAN DIGITAL PILIPINAS.....11**
- **FINTECH OUTLOOK: CHARTING THE COURSE: INDONESIA FINTECH 2024 AND BEYOND.....12**
- **PANEL DISCUSSION #2: THE DIGITAL BANKING REVOLUTION: NAVIGATING THE FUTURE WHILE MAINTAINING TRUST AND STABILITY.....14**
- **PANEL DISCUSSION #3: UNLEASHING WOMEN'S LEADERSHIP POTENTIAL: ADVANCING GENDER EQUALITY IN INDONESIA'S FINTECH INDUSTRY.....16**
- **VISIONARY TALK: LAUNCHING STUDY FINDINGS: ENHANCING FINANCIAL INCLUSION: NON-DIGITAL APPROACH IN ONBOARDING THE UNBANKED AND UNDERBANKED.....17**
- **ROCKSTAR TALK: INNOVATION THROUGH INTERCONNECTIVITY: SUPPORTING SOUTHEAST ASIA'S DIGITAL PAYMENTS REVOLUTION THROUGH PAYMENTS API.....19**
- **SEREMONIAL PENANDATANGANAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) KERJA SAMA KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENYEBARAN INFORMASI BIDANG PERENCANAAN KEUANGAN DAN TEKNOLOGI FINANSIAL ANTARA AFTECH DENGAN INTERNATIONAL ASSOCIATION OF REGISTERED FINANCIAL CONSULTANTS (IARFC) INDONESIA.....20**
- **VISIONARY TALK: DIGITALIZING INDONESIAN REGIONS: PAVING THE FUTURE OF INCLUSIVE FINANCE THROUGH DIGITAL FINANCIAL INNOVATION.....21**

Hari Kedua Indonesia Fintech Summit & Expo 2023

- **OPENING SPEECH: ENHANCING FINANCIAL INCLUSION THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION: AFTECH'S JOURNEY AND VISION.....23**
- **KEYNOTE SPEECH: RESPONSIBLE AND TRUSTWORTHY USE OF AI IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR.....24**
- **SUPER PANEL DISCUSSION: POLICIES AND INCENTIVES FOR A THRIVING DIGITAL ECONOMY.....25**
- **SPECIAL PANEL DISCUSSION: EMPOWERING WORKFORCE OF TOMORROW: NURTURING YOUTH TALENT IN THE DIGITAL AGE.....27**
- **SEREMONIAL PENANDATANGANAN PROJECT CHARTER: PENYUSUNAN PEDOMAN KEPATUHAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI INDUSTRI FINTECH.....28**
- **HARD TALK #1: SAFEGUARDING THE DIGITAL ECOSYSTEM: PERSONAL DATA PROTECTION AND CYBERSECURITY IN THE MODERN AGE.....29**
- **HARD TALK #2: EMPOWERING THE BACKBONE OF OUR ECONOMY: INCLUSIVE FINANCING FOR MSME'S GROWTH AND RESILIENCE.....31**
- **FINTECH VISIONARY TALK – ENABLING DIGITAL PUBLIC INFRASTRUCTURE TO ACCELERATE FINTECH INNOVATIONS AND ACHIEVE WIDER OUTREACH.....33**
- **PANEL DISCUSSION: FINTECH ROLE IN AMPLIFYING GOVERNMENT-TO-PERSON INITIATIVES: COLLABORATION, INNOVATION AND IMPACT.....34**

INDONESIA FINTECH SUMMIT & EXPO 2023

Hari Pertama, Kamis, 23 November 2023

OPENING SPEECH: LAPORAN KEGIATAN INDONESIA FINTECH SUMMIT & EXPO (IFSE) 2023

Hari pertama IFSE 2023 diawali dengan *opening speech* oleh Bapak Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengangkat beberapa poin sebagai berikut:

1. Fintech telah menjadi lebih solutif dan akrab bagi masyarakat umum dengan pertumbuhan yang dipercepat melalui integrasi dan kolaborasi berkelanjutan. Hal ini mencakup penggunaan berbagai solusi dan layanan fintech yang memberikan dampak positif. Industri fintech Indonesia terus berupaya meningkatkan akses keuangan dan menawarkan solusi yang lebih efisien untuk kebutuhan keuangan sehari-hari. Hal ini menunjukkan inovasi teknologi sektor keuangan yang telah menjadi bagian terintegrasi dari kehidupan masyarakat.
2. Sebagai puncak dari Bulan Fintech Nasional (BFN) 2023 yang diresmikan pada 10 November 2023 dan berlangsung hingga 12 Desember 2023, IFSE 2023 diselenggarakan bersama oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Acara ini mencakup *pre-event*, *media gathering*, dan berbagai kegiatan lainnya. IFSE 2023 antara lain bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara pelaku industri fintech dan *stakeholders* lainnya serta meningkatkan kesadaran publik tentang fintech dan ekosistem keuangan digital. IFSE 2023 juga menghadirkan 25 sesi dengan 70 pembicara nasional dan internasional serta 36 *booth* pada *Expo* yang diharapkan dapat meningkatkan adopsi fintech dan kesadaran akan risiko keuangan digital.
3. Selama BFN 2023, terdapat lebih dari 210 program promosi yang telah diberikan untuk masyarakat, termasuk *virtual job fair* fintech yang menawarkan lebih dari 120 lowongan pekerjaan. Selain itu, terdapat 77 kegiatan edukasi dan literasi keuangan digelar dengan fokus pada fintech dan ekosistem keuangan digital Indonesia.



FINTECH VISIONARY SPEECH: CHARTING INDONESIA'S PATH TOWARDS A RESILIENT DIGITAL ECONOMY THROUGH STRONG DOMESTIC FOUNDATION

Bapak Suhasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, mengangkat topik pengembangan dan penguatan ekonomi yang mencakup:



1. Mimpi Indonesia adalah menciptakan ekonomi digital dan menjadi negara maju. Hal ini dapat tercapai dengan tahap-tahap yang harus dilewati, serta dengan meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan inovasi.
2. Inovasi menjadi sangat penting karena kondisi ekonomi dan kemanusiaan dipengaruhi oleh produktivitas dan kreativitas. Inovasi di bidang teknologi sangat penting dan inovasi ingin terus ditumbuhkan dengan mendorong keamanan, stabilitas, dan pengembangan.
3. Fintech memiliki aspek-aspek yang perlu dijaga antara lain adalah aspek keamanan data dan keamanan transaksi. Sektor keuangan Indonesia dapat berkembang dan dipercaya karena merupakan salah satu sektor yang *highly regulated*.
4. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya manusia Indonesia harus terus memunculkan inovasi dan kreativitas untuk mengapresiasi sektor keuangan, karena inovasi teknologi sektor keuangan memunculkan efisiensi yang luar biasa.
5. Keinginan *regulator* (baik BI, OJK, Kementerian Keuangan) dari sektor keuangan adalah *financial deepening*, *financial inclusion*, dan *financial stability* bersamaan dengan pelaku industri sektor keuangan dalam menciptakan inovasi baru menuju Indonesia 2045.

KEYNOTE SPEECH: PERKEMBANGAN INDUSTRI JASA KEUANGAN SECARA UMUM PASCA UNDANG-UNDANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UU P2SK)

Bapak Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisiner, OJK, dalam keynote speech beliau memberikan arahan terkait beberapa hal:



1. Meskipun terjadi banyak perubahan dari Indonesia Fintech Summit (IFS) 2022 ke IFSE 2023, komitmen asosiasi-asosiasi fintech tetap *solid*, bahkan lebih kuat dari tahun sebelumnya. Terdapat semangat yang kuat dari asosiasi-asosiasi fintech untuk membangun komunikasi yang lebih baik antar anggota, dengan tujuan menggalang kerjasama dan menciptakan tujuan bersama, bukan persaingan yang merugikan anggotanya atau ekosistem fintech secara keseluruhan.
2. Industri fintech mengalami perubahan signifikan dalam satu tahun terakhir. Pada tahun 2022, industri fintech berada di puncak karena adanya likuiditas global yang berlebih dengan suku bunga rendah. Namun kini fokus industri telah bergeser dengan adanya kondisi likuiditas yang lebih ketat dan suku bunga yang lebih tinggi. Saat ini, aspek profitabilitas menjadi jauh lebih penting daripada sekadar meningkatkan *acquisition rate*. *Investor* lebih cenderung tertarik pada fintech yang menunjukkan profitabilitas yang berkelanjutan.
3. Isu keberlanjutan menjadi sangat penting di tahun ini, dengan pemahaman bahwa tidak akan ada kesempatan untuk *survive* tanpa keberlanjutan. Isu baru yang muncul meliputi perlindungan konsumen, kepercayaan masyarakat, serta pentingnya penerapan *governance, risk management, and compliance* (GRC) yang baik dalam teknologi. Fintech juga kini harus dapat beradaptasi dengan tantangan baru untuk mencapai keberlanjutan.
4. Meskipun menghadapi tantangan, *fundamental* industri fintech Indonesia tetap tidak berubah, yaitu kebutuhan akan kreativitas dan inovasi untuk pembangunan dan masa depan. Di Indonesia terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan teknologi dan fintech dengan kepentingan, kondisi, konteks, dan masalah yang dihadapi bangsa. Fintech perlu mencari solusi yang unik dan relevan untuk Indonesia, bukan sekadar meniru apa yang dilakukan oleh negara lain.
5. Peluang yang besar untuk industri fintech dapat dilihat dari tingginya tingkat populasi masyarakat Indonesia serta kebutuhan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Negara ini memiliki sumber daya unik yang tidak dimiliki oleh negara lain, dan ada komitmen, dukungan, serta kesiapan dari pemerintah, *regulator*, dan *stakeholders* terhadap industri fintech. Salah satu buktinya adalah Indonesia memiliki Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mendukung promosi, pengembangan, dan penguatan industri teknologi di sektor keuangan. Hal tersebut dibuktikan dengan inisiatif peluncuran *Guideline* dan *Code of Conduct* untuk *Responsible Artificial Intelligence* (AI) dalam IFSE 2023.

SEREMONIAL PROSESI PEMBUKAAN IFSE 2023

Seremonial prosesi pembukaan IFSE 2023 dilaksanakan oleh Bapak Mahendra Siregar (Ketua Dewan Komisioner OJK), Bapak Hasan Fawzi (Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK), Bapak Suahasil Nazara (Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia), Bapak Budi Gandasoebrota (Sekretaris Jenderal AFTECH), Bapak Ronald Yusuf Wijaya (Ketua Umum AFSI), dan Bapak Entjik S. Djafar (Ketua Umum AFPI).



1. Sesi seremonial ini secara sah membuka pelaksanaan IFSE 2023 yang diadakan tanggal 23-24 November 2023 di *The Kasablanka Hall*, Mall Kota Kasablanka, Jakarta dengan mengusung tema *"Accelerating Growth: Promoting Sustainable Integration and Collaboration for A Stronger Digital Economy"*.
2. Kegiatan tahun ini ditujukan untuk mendukung terciptanya penguatan pemahaman akan industri fintech nasional serta mendukung peningkatan inklusi dan literasi keuangan masyarakat, serta dapat membantu para regulator dan pemangku kepentingan lainnya dalam bekerjasama menyusun kebijakan yang lebih baik.

SEREMONIAL PELUNCURAN *GUIDELINE OF ASSOCIATIONS' CODE OF CONDUCT: RESPONSIBLE AND TRUSTWORTHY USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR*

Peluncuran ini dilaksanakan oleh Bapak Hasan Fawzi (Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK), Bapak Budi Gandasoebrata (Sekretaris Jenderal AFTECH) Bapak Ronald Yusuf Wijaya (Ketua Umum AFSI), Bapak Entjik S. Djafar (Ketua Umum, AFPI), Bapak Dyatmika Nandana Pawitra (Ketua Umum ALUDI), dengan disaksikan oleh Bapak Mahendra Siregar (Ketua Dewan Komisiner OJK) dan Bapak Suahasil Nazara (Wakil Menteri Keuangan RI).



1. Panduan *Code of Conduct* (CoC) ini merupakan komitmen bersama antara OJK dan seluruh asosiasi fintech terkait untuk mengimplementasikan pengembangan dan pemanfaatan AI yang bertanggung jawab dan terpercaya di Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK).
2. Panduan CoC ini juga menjadi dasar bagi masing-masing asosiasi dalam menyusun CoC bagi para anggotanya guna meningkatkan tata kelola penerapan AI dalam pengembangan proses bisnis, model bisnis, aktivitas layanan dan produk yang berbasis *digital*.
3. Panduan CoC ini antara lain mencantumkan prinsip - prinsip berasaskan Pancasila, asas kebermanfaatan, asas wajar dan akuntabel, asas transparan dan dapat dijelaskan, serta tangguh dan aman.

SPECIAL PANEL DISCUSSION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES: NEXT GENERATIONS OF FINANCIAL TECHNOLOGY



Para panelis yang mengisi sesi ini adalah Bapak Djoko Kurnijanto (Kepala Departemen Pengaturan Dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK), Ibu Butet Linda (Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia), Bapak Budi Gandasoebrata (Sekretaris Jenderal AFTECH), dan Bapak Ronald Yusuf Wijaya (Ketua Umum AFSI). Sesi yang dimoderatori oleh Bapak Rizky Wisnoentoro (CEO & Co-Founder IMPAC+ Indonesia) ini mendiskusikan isu terkait:

1. Kunci perkembangan sektor keuangan adalah inovasi dan kreativitas. *Regulator* pasti akan menerima inovasi dan kreativitas yang diciptakan para pelaku industri sektor keuangan. Pertimbangan yang juga harus dilakukan adalah mitigasi risiko, terutama bagaimana menyeimbangkan antara inovasi dan mitigasi risiko.
2. Dalam UU P2SK secara eksplisit disebutkan untuk melakukan ruang uji coba (*sandbox*) dalam rangka menjaga equilibrium antara inovasi dan mitigasi risiko. Dalam rangka menjaga equilibrium tersebut, *regulator* membuat peraturan yang bersifat *principal based* dan berkolaborasi dengan asosiasi, dengan harapan dapat dituangkan secara detil dalam bentuk *Code of Ethic*.
3. OJK meningkatkan literasi kepada mereka yang sedang menggunakan sesuatu yang baru, karena *gap* antara inklusi dan literasi cukup jauh. OJK menyiapkan regulasi yang efisien, pengawasan yang memadai untuk aset digital dan aset kripto, dan melakukan upaya kampanye untuk inklusi dan literasi keuangan.
4. Inovasi sangat pesat dan bagaimana mengoptimalkan manfaat dari inovasi yang sudah ada dan memitigasi risiko. *Regulator* mencari titik optimal supaya bisa memberikan layanan yang memudahkan masyarakat dan memberikan *user experience* yang lebih baik.
5. BI melakukan *regulatory reform* berbasis aktivitas dengan mengefisiensikan perizinan dan persetujuan. BI melakukan *sandbox* terkait inovasi bidang sistem pembayaran, inovasi produk dan layanan yang belum diimplementasikan. Selain itu, BI juga mengedepankan bagaimana menyeimbangkan inovasi dan mitigasi risiko, memperkuat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) untuk pelaku Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan perlindungan konsumen.

6. BI selalu melibatkan para pelaku industri dan sering berkoordinasi dengan OJK. Setiap BI melakukan perubahan regulasi atau pengembangan, asosiasi dan industri dilibatkan sejak awal, sehingga tidak ada yang kaget terkait dengan implementasinya. Digitalisasi harus dilakukan bersama-sama, kolaborasi antara *regulator*, asosiasi, dan industri.
7. Literasi dan inklusi keuangan sangat penting dengan semakin banyaknya produk-produk keuangan yang merambah masyarakat. Tanggung jawab *regulator*, asosiasi, dan industri adalah untuk meningkatkan literasi keuangan.
8. Dengan adanya kriptografi dan *blockchain*, akan ada inovasi-inovasi yang tidak hanya dari *private sector*, tetapi juga dari *public sector*. Contohnya adalah BI yang telah meluncurkan *whitepaper* Proyek Garuda untuk *Central Bank Digital Currency* (CBDC). CBDC merupakan salah satu solusi untuk operasi moneter yang lebih baik, pasar uang yang lebih baik.
9. Kolaborasi dengan *regulator* berjalan dengan baik. Setiap ada inovasi yang terjadi, industri pasti akan dilibatkan untuk memberikan masukan untuk berbagai inisiatif-inisiatif. Asosiasi juga dilibatkan dalam hal perumusan regulasi.

PANEL DISCUSSION #1: THE FUTURE OF CAPITAL MARKETS : PREDICTIONS AND TRENDS: INTEGRATING VIRTUAL REALITY (VR) AND AUGMENTED REALITY (AR) IN TRADING

Sesi panel yang dimoderatori oleh Ibu Ni Putu Kurniasari (Ketua Departemen Pasar Modal AFTECH) melihat para panelis Bapak Antonius Hari P. M. (Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal OJK), Bapak Irvan Susandy (Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI), Mr. Ravi Ivaturi (Senior Advisor PwC) membahas poin-poin berikut:

1. Sebagian besar *investor* pasar modal Indonesia merupakan kaum muda. Dari total *investor* pasar modal sebanyak 11,9 juta, 56% berusia di bawah usia 30 tahun dan 24% berusia di bawah 40 tahun. Hal ini menunjukkan potensi besar untuk mengembangkan pasar modal melalui teknologi, dengan fokus pada penambahan jumlah investor, efisiensi transaksi, dan kemudahan



akses (seperti kemampuan melakukan transaksi dari mana saja). Oleh karena itu, inovasi seperti pembukaan akun secara *online* dan penggunaan *Augmented Reality (AR) / Virtual Reality (VR)* untuk *order management* sedang dikembangkan.

2. Undang-Undang Pasar Modal menetapkan bahwa pengembangan teknologi harus mencakup tiga aspek utama, yakni “teratur, wajar, dan efisien.” Hal ini berarti bahwa setiap teknologi yang dikembangkan harus sesuai dengan regulasi terkait yang berlaku, semua pelaku harus terdaftar, dan transaksi harus sesuai dengan pedoman OJK. Adapun tantangan utama dalam penerapan teknologi seperti AR/VR termasuk kesiapan infrastruktur, regulasi yang mendukung, dan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
3. Penting untuk memastikan bahwa *investor* mengetahui tentang produk yang mereka beli. Manajemen risiko dan perlindungan konsumen menjadi aspek penting dalam pengembangan teknologi seperti AR/VR. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga berfokus pada literasi dan edukasi *investor* melalui kantor perwakilan di berbagai kota, serta menyediakan tempat pengujian bagi anggota bursa untuk memastikan pengalaman berinvestasi yang aman dan terinformasi.
4. BEI tidak hanya memfasilitasi infrastruktur, tetapi juga mengembangkan produk baru seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Virtual dan sistem *trading* algoritmik dengan *time lag* yang minimal. Bursa berkoordinasi erat dengan OJK dan anggota bursa serta mendorong kolaborasi antara anggota bursa dan pelaku industri keuangan lainnya, termasuk fintech, guna memperluas akses pasar.

5. Meskipun teknologi AR/VR telah ada cukup lama, tantangan utamanya termasuk infrastruktur perangkat keras, kenyamanan pemakaian, serta harga perangkat yang masih mahal. Namun, terdapat potensi besar untuk penggunaan AR/VR dalam pendidikan, kesehatan, dan *gaming*. Kunci untuk adopsi luas AR/VR adalah memastikan kemudahan akses dan penggunaan. Diharapkan akan ada lebih banyak *use case* AR/VR di Indonesia dalam lima tahun kedepan, terutama jika perangkat menjadi lebih terjangkau dan aman.

SEREMONIAL PELUNCURAN INSURTECH WHITE PAPER OVERVIEW OF INSURTECH BUSINESS MODEL IMPLEMENTATION IN INDONESIA: CHALLENGES, OPPORTUNITIES AND SUGGESTED DISCUSSION POINTS FOR POLICY DEVELOPMENT

Seremonial peluncuran dihadiri oleh Bapak Iwan Pasila (Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK), Bapak Aldi Haryopratomo (Wakil Ketua Umum II AFTECH), dan Bapak Erlangga Soeria Atmadja (Director of Financial Advisory, Infrastructure & Capital Projects Deloitte Indonesia).



1. Sesi seremonial ini ditujukan untuk meluncurkan *Whitepaper* berjudul “*Overview of Insurtech Business Model Implementation in Indonesia: Challenges, Opportunities and Policy Recommendations*”.
2. *Whitepaper* terkait *insurtech* ini disusun dengan memperhatikan perkembangan teknologi dalam mendukung bisnis asuransi. Kemajuan teknologi ini telah mendisrupsi lanskap sektor jasa keuangan, sekaligus menawarkan peluang dan tantangan pengembangan industri *insurtech* di Indonesia.

HARD TALK #1: SCALING-UP COLLABORATION AMONG DIGITAL FINANCIAL TECHNOLOGY INNOVATION AND INSURANCE COMPANIES TO ENHANCE FINANCIAL INCLUSION

Pada sesi ini, moderator Bapak Aldi Haryoprato (Wakil Ketua Umum II AFTECH) berdiskusi dengan Bapak Iwan Pasila (Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK), Bapak Teguh Aria Djana (Vice Chairman for IT, Applied Tech & Financial Technology Affairs Asosiasi Asuransi Umum Indonesia), Bapak Erlangga Soeria Atmadja (Director of Financial Advisory, Infrastructure & Capital Projects Deloitte Indonesia). Adapun poin-poin diskusi terkait inovasi teknologi keuangan digital terhadap asuransi yang dibahas sebagai berikut:



1. Asuransi telah menjadi bagian dari *life cycle* banyak masyarakat Indonesia. Setiap orang dalam hidupnya menghadapi berbagai risiko dan sebagian dari risiko tersebut dapat diasuransikan.
2. Penggunaan teknologi digital dapat membantu meningkatkan *customer experience* dan meningkatkan efisiensi biaya. Kedepan, penggunaan teknologi AI juga diharapkan dapat membantu meningkatkan proses manajemen risiko perusahaan asuransi.
3. *Tech enabler* dalam industri perasuransian sangat diperlukan karena mendorong proses inklusi keuangan secara lebih efisien dan turut membantu proses manajemen risiko.
4. Terdapat tiga hal yang perlu menjadi perhatian *stakeholder* industri perasuransian, yakni penerapan penuh *e-policy*, perlindungan data pribadi, dan meningkatkan efisiensi perizinan sebagai daya tarik industri.
5. Asosiasi dapat menjadi katalis untuk mendorong kolaborasi antar anggota dalam mewujudkan *end-to-end process* pada pengembangan industri perasuransian.
6. Disarankan untuk mengkaji kembali regulasi terkait *e-policy* agar dapat diterapkan secara *fully digital*.
7. Diperlukan untuk memperbaiki tata kelola regulasi industri perasuransian agar menjadi lebih efisien dan memasukkan *tech enabler* dan berbagai inovasi lain di industri perasuransian.

SEREMONIAL PENANDATANGANAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) ANTARA AFTECH DENGAN DIGITAL PILIPINAS

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dilaksanakan oleh Bapak Harianto Gunawan (Wakil Ketua Umum III AFTECH) dan Ms. Amor Maclang (Convenor of Digital Pilipinas).



1. Prosesi seremonial ini merupakan bentuk simbolis Penandatanganan MoU antara AFTECH dengan Digital Pilipinas.
2. Digital Pilipinas merupakan sebuah wadah dan gerakan terbesar di Filipina yang diprakarsai oleh sektor swasta dalam mendorong dan mengawal kemajuan teknologi sembari mendukung perluasan ekonomi digital. Digital Pilipinas juga bertekad untuk menciptakan ekosistem teknologi dan inovasi yang kompetitif secara global dan dalam kawasan regional Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

FINTECH OUTLOOK: CHARTING THE COURSE: INDONESIA FINTECH 2024 AND BEYOND



Bapak Alwin Kiemas (Wakil Sekretaris Jenderal III AFTECH) menjadi moderator sesi yang diisi oleh para ekonom senior dalam dan luar negeri, Bapak Teguh Yudo Wicaksono (Head of Mandiri Institute), Bapak Chaikal Nuryakin (Kepala LPEM FEB UI) dan Mr. Francesco Strobbe (Lead Financial Sector Economist World Bank Jakarta). Diskusi meliputi tantangan dan potensi industri fintech Indonesia kedepannya

1. Dampak ekonomi digital sangat besar bagi perekonomian Indonesia dan telah mengubah *behavior* produsen dan konsumen. Sebagai contoh, terdapat banyak *mini market* yang telah berhasil melaksanakan digitalisasi *inventory management system*. Dampak ekonomi digital juga terlihat bagaimana penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Bank Mandiri beberapa tahun lalu hanya mencakup 1% dari seluruh transaksi nasabah, kini mencapai sekitar 20% dari seluruh transaksi nasabah Bank Mandiri di tahun ini. Selain itu, QRIS *Crossborder* juga merupakan dampak besar ekonomi digital yang tidak dapat terbayangkan di tahun-tahun sebelumnya.
2. Akan lebih baik jika kedepannya fintech dapat lebih menargetkan masyarakat *unbanked*, khususnya yang tinggal di daerah terpencil. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam bentuk infrastruktur yang kurang memadai, serta masyarakat yang terbiasa dengan jasa keuangan tradisional, kultural dan informal. Fintech baiknya dapat menyediakan jasa yang dapat diterima oleh masyarakat tradisional di daerah terpencil.
3. Indonesia melakukan komitmen terpuji agar *regulatory framework* dapat beradaptasi pada lanskap fintech yang terus berevolusi. Hal ini merefleksikan pemahaman dan upaya pemerintah untuk mencapai keseimbangan antara inovasi dengan integritas dan stabilitas, sehingga inovasi bertanggung jawab dapat terus tercipta. Sebagai contoh adalah pentingnya penekanan peningkatan perlindungan konsumen yang menunjukkan industri mendukung budaya transparansi dan akuntabilitas.
4. BI dan OJK cenderung masih mengutamakan stabilitas dibandingkan pertumbuhan, alhasil *regulator* lebih *risk averse* dalam mengembangkan kebijakan. Apabila Indonesia Emas 2045 ingin direalisasikan, maka kebijakan-kebijakan baiknya menjadi lebih *risk-taking* namun sangat mendukung pertumbuhan. *Regulator* diharapkan dapat terus memberikan ruang bagi keuangan digital di tahap-tahap awal mereka agar dapat berinovasi dan bertumbuh, khususnya untuk memberikan jasa pada daerah-daerah terpencil.

5. Indonesia memiliki potensi industri fintech luar biasa yang didukung oleh besarnya populasi digital Indonesia. Indonesia sebaiknya tidak hanya fokus pada *domestic demand* tetapi mencari cara agar dapat menjadi *regional hub* untuk inovasi di Asia Tenggara. Masih terdapat banyak potensi, seperti 78 juta orang Indonesia yang masih melakukan pembayaran dengan *cash*. Akan sangat baik juga apabila *regulatory framework* Indonesia terus beradaptasi mengikuti perkembangan, dipastikan adanya infrastruktur keuangan digital yang memadai dan menghasilkan konektivitas lebih baik; serta adanya jaminan keamanan siber yang kuat.

6. Saat ini terdapat banyak fintech di Indonesia yang berkecimpung pada *green sectors*, di mana mereka menjadi bagian dari *value chain* untuk *Electronic Vehicle (EV)*, energi terbarukan dan lainnya. Baiknya fintech tersebut melibatkan Taksonomi Hijau OJK dalam mengkategorisasikan produk-produk yang mereka tawarkan. Dengan ini semua, industri fintech Indonesia berpotensi tidak hanya menjadi pemimpin pasar ASEAN, namun juga benua Asia secara keseluruhan.

PANEL DISCUSSION #2: THE DIGITAL BANKING REVOLUTION: NAVIGATING THE FUTURE WHILE MAINTAINING TRUST AND STABILITY

Sesi panel ini menampilkan diskusi antara para *stakeholders* terkait sektor bank digital, yakni Ibu Yanti Pusparini (Executive Director ASPI), Bapak Henry Koenafi (Pengurus Bidang Operation, Teknologi dan Regulatory Reporting PERBANAS), dan Ibu Dessy Masri (Head of Product & Solutions VISA Indonesia). Dimoderatori oleh Bapak Harianto Gunawan (Wakil Ketua Umum III AFTECH), sesi terkait masa depan bank digital ini membahas:



1. Ekosistem Sistem Pembayaran (SP) di Indonesia semakin terbuka. Pelaku SP juga semakin beragam dari sisi bank ataupun fintech. Bank digital hadir sebagai terobosan yang dilakukan oleh perbankan untuk mengakomodir berkembangnya model bisnis, instrumen dan juga kanal sistem pembayaran yang ada.
2. Pentingnya interkoneksi dan interoperabilitas dalam SP untuk mendorong pengembangan standar seluruh PJP baik bank ataupun non-bank agar memiliki keseragaman sehingga dapat meningkatkan inklusi dan efisiensi.
3. Dengan semakin berkembangnya digitalisasi, penting bagi seluruh pemangku kepentingan di industri pembayaran untuk menyeimbangkan kecepatan inovasi dengan keamanan teknologi yang digunakan sehingga tetap dapat menjaga *trust* masyarakat.
4. Keamanan siber merupakan risiko yang tidak dapat dihindari dari berkembangnya digitalisasi sehingga perlunya sinergi dan kolaborasi baik antara bank dengan bank ataupun bank dengan non-bank, misalkan fintech untuk bersama-sama membangun platform digitalisasi yang *solid* dan memenuhi syarat keamanan siber. Selain itu, dalam memerangi kejahatan siber, juga diperlukan edukasi terhadap masyarakat agar terhindar dari penipuan digital.

5. Mengacu pada studi yang dilakukan VISA pada tahun 2022, yaitu *Consumer Payment Attitude Study* dimana studi ini dilakukan setiap tahun dengan 1000 orang sebagai responden yang tersebar pada 10 kota besar di Indonesia. Responden mencakup *Generation Z (Gen Z)*, *Generation X (Gen X)*, *Generation Y (Gen Y)*, *baby boomers*. Survei ini menyatakan bahwa minat masyarakat Indonesia terhadap bank digital setiap tahun mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 sebesar 75% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 90% artinya 9 dari 10 orang berminat terhadap bank digital.
6. Berdasarkan studi tersebut, faktor peningkatan permintaan tersebut didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut – 1) Bank digital memberikan layanan 24/7; 2) Bank digital memberikan kemudahan akses untuk dapat dinikmati dari lokasi manapun dan 3) Bank digital membuat pengguna merasa aman, berbeda apabila bertransaksi secara *offline* yang dapat memunculkan kekhawatiran misalnya terjadi perampokan.
7. Bagi segmen yang belum berminat dengan bank digital menjadi pekerjaan bersama di industri, khususnya perbankan, untuk mengantisipasi kekhawatiran masyarakat yang belum memiliki minat. Kekhawatiran tersebut adalah masalah *trust* dimana masyarakat khawatir rekening mereka dapat kena terkena *hacking*, *fraud*, dan adanya ketidakstabilan pada sistem bank digital seperti belum berhasil melakukan transfer tetapi saldo sudah terpotong.
8. Penggunaan QRIS dan BI-FAST memiliki trend yang selalu naik dari waktu ke waktu. ASPI berkontribusi untuk menerbitkan ketentuan teknis dan/atau mikro pembayaran yang wajib diikuti oleh seluruh anggota ASPI termasuk terkait dengan edukasi kepada konsumen dan *merchant*. Hal yang sudah dilakukan ASPI adalah adanya pedoman teknis terkait edukasi QRIS kepada *merchant* yang mengatur standar materi yang harus ada dalam kegiatan edukasi sehingga informasinya konsisten, seragam dan mudah dipahami oleh konsumen.
9. Pentingnya melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain dalam meningkatkan literasi masyarakat melalui kegiatan berbentuk webinar, video atau acara seperti IFSE 2023. Dari sisi regulasi, penting bagi *regulator* untuk menyesuaikan regulasi dengan teknologi yang tersedia dan tentunya aman.
10. Teknologi *contactless* dalam SP merupakan teknologi yang sebenarnya telah ada dari sekitar 20 tahun lalu. Dengan umur teknologi tersebut, berarti sudah dapat dibuktikan bahwa teknologi *contactless* merupakan teknologi yang aman dan mudah sehingga dapat dinikmati oleh konsumen. Namun, di Indonesia adopsi teknologi *contactless* masih terbilang lambat dibandingkan dengan apa yang terjadi secara global karena *contactless* bukan hanya sekedar kartu fisik yang ditempelkan pada terminal tetapi bagaimana pembayaran digital menjadi wearable misalnya transaksi pembayaran dapat dilakukan hanya dengan menempelkan *smartphone* atau jam tangan.

PANEL DISCUSSION #3: UNLEASHING WOMEN'S LEADERSHIP POTENTIAL: ADVANCING GENDER EQUALITY IN INDONESIA'S FINTECH INDUSTRY

Ibu Sophia Wattimena (Ketua Dewan Audit OJK), Bapak Elwyn Panggabean (Director Advisory Services for Southeast Asia WWB), dan Ibu Lily Marpaung (Wakil Ketua Umum I AFTECH) di sesi panel ini mendiskusikan potensi kepemimpinan wanita di industri fintech Indonesia. Bersama moderator Ibu Tessa Wijaya (Co-Founder & Chief Operating Officer Xendit), sesi ini menyampaikan:



1. Menurut data statistik, kondisi kesenjangan gender di Indonesia masih membutuhkan perhatian khusus dari berbagai *stakeholders* dan relevan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital.
2. Di sisi lain, potensi ekonomi digital yang dapat melibatkan partisipasi perempuan bisa lebih digali dengan adanya kolaborasi berbagai macam pihak, termasuk pelaku industri fintech, *regulator*, masyarakat, serta pegiat ekonomi digital.
3. Keterlibatan perempuan, khususnya sebagai pemimpin, perlu didorong dengan adanya program lokakarya atau pemberdayaan secara internal oleh organisasi terkait.
4. Sebesar 67% masyarakat Indonesia sudah memiliki akses ke teknologi, khususnya *handphone* dan mengadopsi fintech dalam keseharian mereka. Berdasarkan ini, sangat diperlukan peranan dalam mendorong partisipasi perempuan, baik pada sisi penyedia layanan jasa keuangan digital, maupun sisi pengguna fintech.
5. Edukasi dan literasi bagi perempuan terkait pengetahuan mengenai keuangan digital, baik sebagai praktisi maupun pengguna, masih dibutuhkan dari sekolah dasar dan masyarakat di seluruh Indonesia.
6. Indonesia sudah memiliki payung regulasi yang cukup baik. Hal yang menjadi krusial dalam upaya peningkatan keterlibatan perempuan pada keuangan digital adalah adanya praktik yang mendukung melalui implementasi sistem dukungan yang holistik dengan mengutamakan ide *fundamental* bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin dan penggerak, khususnya dalam industri ekonomi digital.
7. Kolaborasi program literasi keuangan digital yang melibatkan pemerintah, pelaku industri, lembaga lainnya, serta masyarakat dapat diperkuat di daerah - daerah di seluruh Indonesia.

VISIONARY TALK: LAUNCHING STUDY FINDINGS: ENHANCING FINANCIAL INCLUSION: NON-DIGITAL APPROACH IN ONBOARDING THE UNBANKED AND UNDERBANKED

Paparan dalam sesi ini disampaikan oleh Ibu Ketut Sulistyawati (Principal Consultant Somia CX) dan Ibu Anindya Fitriyanti (Senior Consultant Somia CX). Sesi menyampaikan *highlight* dari riset lapangan SomiaCX yang mencakup:



1. Tim Somia CX banyak melakukan riset lapangan di beberapa kota di Indonesia. Dalam riset ini, Somia CX bertemu dengan sekitar 300 orang dari segmen *unbanked* dan *underbanked* yang terdiri dari pengusaha mikro, petani, ibu rumah tangga, pelajar, dengan tujuan untuk mencari tahu apa saja kendala-kendala yang dihadapi segmen *unbanked* dan *underbanked* dalam mengadopsi layanan keuangan digital. Contoh kendala adalah keterbatasan ekonomi.
2. Terkadang solusi tidak menimbang keterbatasan ekonomi. Penting bagi kita saat mendesain solusi, baik aplikasi maupun produk finansial untuk mempertimbangkan keterbatasan mereka dalam hal menuju *digital inclusion*.
3. Solusi-solusi saat ini masih jauh secara emosional. Penting sekali untuk memastikan pemberian akses terhadap bantuan dan membangun kepercayaan diri mereka melalui kesuksesan kecil, sehingga mereka mulai terbentuk rasa percaya diri untuk melangkah, sehingga dapat lanjut menggunakan layanan keuangan digital.
4. Di lingkungan sekitar mereka masih menggunakan uang tunai, sehingga layanan keuangan digital digital dirasa lebih sulit. Di sisi lain, masih banyak yang belum tahu bagaimana cara memasukkan uang dari dan ke digital. Penting untuk menciptakan manfaat dan menunjukkan kelebihan digital daripada uang tunai. Sembari mentransisikan ekosistemnya dari uang tunai ke digital, penting juga untuk memastikan akses dan pengetahuan mereka untuk *cash in* dan *cash out*.
5. Apabila petugas onboarding tidak membantu mengajarkan cara layanan keuangan digital, maka akun yang mereka bantu buat bisa saja tidak terpakai. Salah satu penyedia dompet digital memberikan *Key Performance Indicators* (KPI) kepada petugas lapangan untuk transaksi, sehingga petugas di lapangan ingin mengajarkan para masyarakat *unbanked* dan *underbanked*. KPI sangat mempengaruhi perilaku petugas-petugas di lapangan. Pastikan dalam membuat KPI tidak hanya sebatas pembuatan akun, tetapi juga bagaimana membantu para petugas untuk menargetkan penggunaannya, sehingga akun-akun yang sudah dibuat menjadi berkelanjutan dan menjadi *good financial inclusion*

6. **Penting sekali untuk mengedukasi hal yang positif agar masyarakat ingin mencoba. menggunakan. Untuk mengurangi ketakutan akibat rumor negatif, penting untuk membangun *brand familiarity* , sehingga bisa dikenal, lebih dekat, dan lebih dipercaya oleh masyarakat.**
7. *Onboarding masyarakat unbanked dan underbanked ke layanan keuangan digital tidak bisa hanya di solusi digital saja. Terdapat banyak hal lain dari segi non-digital yang perlu diperhatikan untuk memastikan akses dan membangun kepercayaan. Perlu dilakukan kolaborasi dan *collective effort*.*

ROCKSTAR TALK: INNOVATION THROUGH INTERCONNECTIVITY: SUPPORTING SOUTHEAST ASIA'S DIGITAL PAYMENTS REVOLUTION THROUGH PAYMENTS API.



Paparan dalam sesi ini disampaikan oleh Mr. Krishnan Rajagopalan, Head of Global Expansion & Incubation Partnerships Stripe. Sesi yang dimoderatori oleh Bapak Aldi Haryoprato (Wakil Ketua Umum II AFTECH) mendiskusikan:

1. Stripe akan selalu berada di sisi yang sama dengan peraturan dan akan selalu bekerjasama erat dengan regulator dan pemangku kepentingan di market Stripe beroperasi. Salah satu *journey* Stripe adalah untuk menggandeng semua pemangku kepentingan.
2. Masing-masing negara di Asia Tenggara memiliki *regulatory framework* dan pemahaman akan jenis-jenis inovasi yang berbeda, sehingga mengharuskan suatu perusahaan multinasional untuk menghabiskan sekitar 3-4 tahun untuk menyesuaikan dengan *local requirements* (seperti mendapatkan perizinan dan sebagainya). Alangkah baiknya jika terdapat harmonisasi peraturan dan definisi akan jenis-jenis inovasi di antara negara-negara Asia Tenggara, mengingat tujuan utama adalah untuk *enable and support growth*.
3. Uni Eropa (UE) merupakan contoh dengan *regulatory framework* yang baik, dengan berbagai negara anggota dengan kepentingan masing-masing dapat berkumpul dan menyepakati peraturan-peraturan. Contoh baik lainnya adalah penerapan QRIS *Crossborder* dimana *regulator* Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara berhasil berkumpul dan menyepakati beberapa ketentuan sehingga QRIS saat ini dapat digunakan di beberapa negara. Hal ini merupakan *signal of success* dan perlu kita teruskan.
4. India merupakan contoh baik yang mana sebuah pemerintahan dapat mengharmonisasikan secara domestik peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi pemerintah berbeda. Pemahaman yang sama atas peraturan dan definisi-definisi antara instansi pemerintah dalam suatu negara sangat diperlukan.
5. Kolaborasi dan kemitraan dengan perusahaan lokal agar perusahaan multinasional dapat berhasil memasuki suatu *market* dan beroperasi dengan baik juga diperlukan. Stripe ingin dapat berkolaborasi dan bermitra dengan perusahaan lokal di *market* manapun Stripe beroperasi.
6. Pentingnya mendukung harmonisasi peraturan dan definisi-deifinisi akan inovasi baik di dalam negeri maupun antarnegara-negara Asia Tenggara akan semakin mendukung bertumbuhnya inovasi bertanggung jawab.

SEREMONIAL PENANDATANGAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) KERJA SAMA KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENYEBARAN INFORMASI BIDANG PERENCANAAN KEUANGAN DAN TEKNOLOGI FINANSIAL ANTARA ASOSIASI FINTECH INDONESIA (AFTECH) DENGAN INTERNATIONAL ASSOCIATION OF REGISTERED FINANCIAL CONSULTANTS (IARFC) INDONESIA



Penandatanganan MoU dilaksanakan oleh Ibu Lily Marpaung (Wakil Ketua Umum I AFTECH) dan Bapak Bareyn Mochaddin (Direktur Eksekutif IARFC Indonesia).

1. AFTECH dan International Association of Registered Financial Consultants (IAFRC Indonesia) menandatangani MoU terkait kerja sama kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penyebaran informasi bidang perencanaan keuangan dan teknologi finansial.
2. Kolaborasi lokakarya ataupun *training* untuk anggota-anggota IARFC Indonesia mengenai berbagai model bisnis fintech

VISIONARY TALK: DIGITALIZING INDONESIAN REGIONS: PAVING THE FUTURE OF INCLUSIVE FINANCE THROUGH DIGITAL FINANCIAL INNOVATION

Moderator Bapak Dickie (Widjaja Wakil Sekretaris Jenderal I AFTECH) mengajak para panelis Bapak Tedy Alamsyah (Ketua PERBARINDO), Bapak William Francis Indra (Ketua Bidang Keuangan Berkelanjutan dan Industri Keuangan Digital APPI), dan Mr. Jackal Ma (Chairman of Trust Decision and Co-Founder of Tongdun Group) menutup hari pertama IFSE 2023 melalui sesi ini yang membahas:



1. Peningkatan inklusi finansial dapat dilakukan dengan kolaborasi antar *stakeholders*, termasuk BPR yang mencapai lebih dari 1500 BPR dengan aset kurang lebih Rp210 triliun dan menjangkau daerah-daerah di seluruh Indonesia.
2. Peran kolaborasi antar pelaku ekosistem keuangan digital sangatlah penting untuk mendorong peningkatan literasi keuangan di seluruh Indonesia.
3. Dalam perusahaan pembiayaan Indonesia, terdapat banyak sekali model bisnis yang awalnya konvensional berkembang menjadi menggunakan inovasi teknologi dan sudah diakui di bawah OJK.
4. Pemanfaatan teknologi, baik secara infrastruktur, penyelenggara, dan maupun pengguna, notabene telah diadopsi dalam industri keuangan di Indonesia dan mendorong inklusi dan literasi keuangan, khususnya keuangan digital, di banyak daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia.
5. AFTECH memiliki potensi untuk menjadi pendorong dalam kolaborasi antar PERBARINDO, APPI, serta penyedia teknologi, sehingga kebutuhan dari anggota - anggota asosiasi yang banyak macamnya dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia dapat terpenuhi dengan bantuan AFTECH.
6. Distribusi dana Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan cakupan konsumen lebih meluas dan hal ini bisa dihubungkan ke model bisnis fintech pendanaan yang inovatif (alternatif pendanaan).

7. Penggunaan inovasi teknologi dalam bisnis model perusahaan pendanaan juga memiliki potensi besar dalam menjangkau ke daerah-daerah di Indonesia.
8. Diskusi dan kolaborasi antar asosiasi dan pelaku industri keuangan, serta penyedia teknologi untuk meraih peluang dalam fintech sekaligus menghadapi tantangan, misalnya dalam konteks literasi keuangan di daerah pedesaan dan mencegah kasus penipuan.

INDONESIA FINTECH SUMMIT & EXPO 2023

Hari Kedua, Jumat, 24 November 2023

OPENING SPEECH: ENHANCING FINANCIAL INCLUSION THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION : AFTECH'S JOURNEY AND VISION



Bapak Pandu Sjahrir, Ketua Umum, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) membuka hari kedua IFSE 2023 dengan *opening speech* beliau yang mengangkat:

1. Ekosistem keuangan digital Indonesia terus bertumbuh pesat. Laporan SEA *e-Conomy 2023* oleh Temasek, Google, dan *Bain & Company* mencatat bahwa nilai ekonomi digital Indonesia sebesar USD82 miliar di tahun 2023, dan diperkirakan akan mencapai USD109 miliar di tahun 2025, atau rata-rata tumbuh 15% per tahun.
2. Adopsi fintech di Indonesia yang tinggi terlihat dari jumlah transaksi pembayaran digital, yang mencakup transaksi uang elektronik sebesar Rp116,54 triliun dan transaksi QRIS sebesar Rp56,92 triliun per Triwulan III 2023; penyaluran pinjaman *peer-to-peer lending* sebesar Rp55,70 triliun per September 2023; serta nilai transaksi Aset Kripto yang telah mencapai Rp94,4 triliun investasi dengan 17,91 juta jumlah pelanggan terdaftar aset kripto investor per September 2023.
3. Fintech terus berinovasi dan berkembang ditengah banyaknya tantangan domestik maupun global yang ada saat ini. Industri fintech Indonesia mantap melangkah ke arah keberlanjutan dan inklusi, menunjukkan tanggung jawab sosial yang kuat sekaligus memberikan dampak positif bagi ekonomi digital nasional.
4. Meskipun inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 85,10% pada tahun 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 49,68% di tahun yang sama. Oleh karena itu, kolaborasi antarpara pelaku industri Fintech khususnya untuk inisiatif dan kegiatan yang dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia masih perlu ditingkatkan.

KEYNOTE SPEECH: RESPONSIBLE AND TRUSTWORTHY USE OF AI IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR

Bapak Moch. Ihsanuddin, Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, OJK dalam *keynote speech* beliau mengangkat terkait penggunaan AI secara bertanggung jawab:



1. Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Mahendra Siregar bersama para Ketua Asosiasi AFTECH, AFSI, AFPI, dan ALUDI telah meluncurkan panduan CoC penggunaan AI bertanggung jawab. Panduan CoC ini menekankan pentingnya AI yang berasaskan Pancasila, memastikan bahwa penggunaannya bermanfaat bagi asosiasi, anggotanya, serta masyarakat luas. Selain itu, panduan CoC ini juga menyoroti prinsip kewajaran dan *fairness* dalam penerapannya.
2. Pada Januari 2023, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU P2SK yang mempengaruhi 17 peraturan perundang-undangan. UU ini mengakomodasi bisnis-bisnis baru, termasuk ITSK dan Bursa Karbon, menunjukkan dukungan nyata pemerintah dan DPR untuk perkembangan teknologi di sektor keuangan.
3. Sebelum adanya UU P2SK, pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait Ekonomi Digital, yang secara resmi memperkenalkan istilah AI dalam regulasi. Hal ini menandai pentingnya teknologi informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia dan langkah maju dalam integrasi teknologi digital.
4. Mengambil contoh dari negara lain seperti Tiongkok, di mana perkembangan awal teknologi juga melibatkan pembuatan kode etik sebelum menjadi regulasi. Di OJK, saat ini terdapat 101 fintech *Peer-to-peer lending* dan 99 penyelenggara di sektor Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang berada di *regulatory sandbox*, menandakan proses regulasi yang terus berkembang.

SUPER PANEL DISCUSSION: POLICIES AND INCENTIVES FOR A THRIVING DIGITAL ECONOMY



Sesi *super panel* di hari kedua IFSE 2023 memiliki para pejabat tinggi kementerian terkait sebagai panelis, yakni Ibu Mira Tayyiba (Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika), Ibu Rizki Handayani (Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Bapak Isy Karim (Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan), dan Ibu Fatmah Alatas (Tenaga Ahli Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian). Bersama moderator Bapak Riyadi Suparno (Executive Director Tenggara Strategics), para panelis membahas berbagai kebijakan dan insentif untuk mendukung ekonomi digital kedepannya:

1. Kominfo memiliki tiga prinsip dalam melakukan transformasi digital, yaitu inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Inklusif berkaitan dengan spasial seperti daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Dari sisi pengguna, layanan digital dalam arti inklusivitas mengharuskan seluruh masyarakat terlayani. Dari sisi penyelenggara, Indonesia membuka kesempatan kepada global, seperti contoh satelit Starlink. Memberdayakan berkaitan dengan SDM. Hal tersebut dikarenakan SDM akan menggunakan segala infrastruktur layanan digital sehingga terdapat nilai ekonominya. Berkelanjutan berkaitan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs).
2. Kominfo berupaya untuk menyusun *master plan* infrastruktur digital dalam Indonesia Emas 2045 dengan memastikan *coverage*, kualitas, dan *affordability*. Terkait literasi keuangan digital, Kominfo memberikan edukasi dengan salah satu modul keamanan terutama dalam hal perlindungan data pribadi.

3. Dalam sektor pariwisata, fintech terbagi menjadi dua yaitu berkaitan dengan alat pembayaran dan pembiayaan. Dari sisi alat pembayaran dapat memudahkan orang, baik di destinasi wisata maupun pembelian. Dari sisi pembiayaan, dapat menguntungkan pelaku-pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sebagai contoh, Kemenparekraf memiliki program pembiayaan perfilman dan mendapat animo cukup besar dari masyarakat, serta kedepannya akan bekerjasama dengan asosiasi fintech. Kemudian, pembiayaan untuk kriya, fashion, fintech syariah maupun non syariah.
4. Berbicara tentang insentif, kolaborasi dengan asosiasi fintech dapat membuat masyarakat merasa aman, baik untuk investasi maupun pembelian. Fintech menjadi sangat strategis kedepan untuk masyarakat, namun tentunya Kemenparekraf akan terus mendorong kebermanfaatan fintech ke dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
5. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2023 merupakan revisi dari Permendag 50 tahun 2020 yang memiliki tujuan untuk menciptakan ekosistem melalui sistem elektronik dengan memperhatikan teknologi informasi yang begitu pesat, mendukung pemberdayaan UMKM dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam negeri, dan meningkatkan perlindungan konsumen.
6. Peran fintech dalam sektor perdagangan dapat dilihat dari sisi pengguna dan *regulator*. Dari sisi pengguna, apabila dilihat dari perdagangan dalam negeri para pengguna melakukan kegiatan usaha ekonomi lokal dengan menggunakan fintech. Dari sisi *regulator*, kementerian perdagangan menjaga stabilitas kebutuhan pokok dapat terpenuhi di kalangan masyarakat dan meningkatkan akses untuk pasar produk di dalam maupun luar negeri dengan menggunakan fintech.
7. Fintech akan memberikan ruang gerak bagi para pelaku usaha untuk memfasilitasi transaksi yang dilakukan oleh *merchants* yang mempromosikan produknya melalui social media. Kemudian, dari sisi program dalam rangka digitalisasi pasar rakyat sehingga akan banyak UMKM yang *on-boarding*. Selanjutnya, dalam rangka pengelolaan Fintech dapat mempermudah pemungutan retribusi. Dari sisi transaksi sangat mempermudah para pelaku usaha dan pembeli dengan menggunakan QRIS.
8. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 114 tahun 2020 yang merupakan agenda pembangunan global yang turut berperan untuk mencapai SDGs, baik mempercepat ekonomi, pengurangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan antardaerah dan antar individu.
9. Kemenko Ekonomi akan terus mendorong masyarakat sasaran keuangan inklusif untuk terus berkembang, salah satunya melalui kewirausahaan pasar digital. Saat ini, pemerintah sedang melakukan kampanye *go digital* agar UMKM dapat menjadi wadah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dalam mendorong kewirausahaan yang inklusif, pemerintah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah. Selain itu, Kemenko Ekonomi menyediakan kartu pra-kerja untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

SPECIAL PANEL DISCUSSION: EMPOWERING WORKFORCE OF TOMORROW: NURTURING YOUTH TALENT IN THE DIGITAL AGE

Sesi *special panel* ini membahas pentingnya pemeliharaan dan pengembangan talenta digital Indonesia. Sesi ini diisi oleh Bapak Bobby Chriss Siagian (Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Perekonomian), Bapak Zamroni (Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional), Mr. Guillaume de Gantès (Senior Partner Financial Services Practice Leader, McKinsey & Company) dan dimoderatori oleh Bapak Firlie Ganinduto (Wakil Sekretaris Jenderal II AFTECH):



1. Pemerintah Indonesia, melalui Kemenko Ekon telah mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Singapura di bidang ekonomi digital, memungkinkan hingga 300 talenta Indonesia untuk magang di perusahaan-perusahaan Singapura selama satu tahun. Inisiatif ini membuka peluang bagi para profesional Indonesia untuk mendapatkan pengalaman internasional dan memperluas keahlian mereka dalam ekonomi digital, yang merupakan sektor penting dan berkembang pesat.
2. BRIN menawarkan program khusus untuk mendukung perusahaan rintisan yang berumur kurang dari tiga tahun dan berbasis riset. Program ini mencakup akses ke fasilitas riset BRIN dan kolaborasi dengan peneliti, serta menyediakan inkubasi untuk membantu pengembangan awal usaha. Tujuannya adalah untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan perusahaan rintisan di Indonesia, khususnya dalam mengintegrasikan riset dan teknologi dalam model bisnis mereka.
3. Terdapat tren global yang bergeser dari penghargaan terhadap kontribusi individu menjadi penghargaan terhadap kerja tim. Dalam konteks ini, aplikasi teknologi AI telah mengubah kebutuhan keahlian di banyak sektor. Misalnya, keahlian dalam linguistik, yang sebelumnya tidak selalu terkait erat dengan teknologi, kini menjadi sangat penting untuk mengembangkan perintah yang lebih spesifik dalam mengoperasikan AI, menunjukkan bagaimana teknologi telah merubah pandangan keahlian yang dibutuhkan di dunia kerja.
4. Meskipun AI diperkirakan akan menggantikan beberapa pekerjaan yang bersifat rutin dan repetitif, peran manusia tetap penting dan tidak dapat digantikan sepenuhnya. Akan ada pekerjaan baru yang muncul, yang diperlukan untuk mengoperasikan dan mengelola AI secara optimal. Hal ini menandakan bahwa meskipun ada pergeseran dalam jenis pekerjaan yang tersedia, kebutuhan akan tenaga kerja manusia dengan keahlian khusus masih akan terus ada dalam mengelola dan memanfaatkan kemajuan AI.

SEREMONIAL PENANDATANGANAN *PROJECT CHARTER*: PENYUSUNAN PEDOMAN KEPATUHAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI INDUSTRI FINTECH



Penandatanganan *Project Charter* ini dilakukan oleh Bapak Marshall Pribadi (Wakil Ketua Umum I, AFTECH) dan Bapak Syahraki Syahrir (President ISACA Indonesia Chapter) dengan didampingi oleh Bapak Handikin Setiawan (Ketua Departemen Cyber Security & Personal Data Protection AFTECH), Ibu Leny Suwardi (Wakil Ketua Departemen Cyber Security & Personal Data Protection AFTECH), Bapak Harun Al Rasyid (Vice President ISACA Indonesia Chapter) serta Ibu Veni Ferawati (Marketing & Communication Director, ISACA Indonesia

Penyusunan Pedoman Kepatuhan terhadap Implementasi Pelindungan Data Pribadi di Industri Fintech ditujukan agar anggota AFTECH memiliki pemahaman dan manajemen risiko yang seragam sehingga dapat mematuhi Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dengan praktik terbaik.

HARD TALK #1:

SAFEGUARDING THE DIGITAL ECOSYSTEM: PERSONAL DATA PROTECTION AND CYBERSECURITY IN THE MODERN AGE

Pembahasan terkait tantangan dan capaian perlindungan data pribadi serta keamanan siber di industri fintech Indonesia ini dibahas bersama secara komprehensif oleh Bapak Bernard Widjaja (Kepala Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK), Bapak Slamet Aji Pamungkas (Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian, Badan Siber dan Sandi Negara) dan Bapak Edwin Putraoetama Octosa (Direktur, PT Mitra Integrasi Informatika). Beberapa poin inti jawaban ketiga panelis dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh moderator Bapak Marshall Pribadi (Wakil Ketua Umum IV, AFTECH):



1. Hasil monitoring *internet traffic* di BSSN tahun 2022 menunjukkan terdapat 976,429,929 anomali *traffic* (atau sekitar 3 juta dalam sehari), dengan rata-rata *successful attack* 3% per hari. BSSN memberikan notifikasi kepada instansi yang dirasa memiliki potensi untuk mendapatkan serangan siber dari anomali *traffic*. BSSN tidak dapat memastikan sumber serangan siber dari dalam atau luar negeri karena mayoritas bersembunyi dalam *internet Protocol (IP)* atau *gateway* yang diatur. Namun apabila melihat monitoring maka banyaknya serangan berasal dari IP atau *gateway* Indonesia.
2. POJK No. 6 Tahun 2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan merupakan bentuk lain dari arahan agar pelaku bisnis menerapkan manajemen risiko terkait perlindungan konsumen dan masyarakat (salah satunya perlindungan data pribadi). OJK ingin para pelaku bisnis menjamin sistem operasional bisnis mereka handal, dan data pribadi konsumen mereka tersimpan dan dilakukan dokumentasi dengan baik.
3. Terdapat beberapa tantangan yang cukup aman terkait serangan siber dan perlindungan data pribadi, yakni – 1) kompleksitas teknologi di mana semakin cepatnya digitalisasi mengharuskan teknologi menjadi semakin *agile*; 2) semakin variatif pola serangan siber; dan 3) belum tingginya *awareness* masyarakat. Sebuah perusahaan harus memastikan elemen teknologi, SDM dan *governance* optimal agar memastikan pengamanan siber yang holistik.

4. Salah satu Visi Misi Ekonomi Digital oleh Kemenko Ekon adalah agar Indonesia pada tahun 2045 masuk dalam 7 besar ekonomi dunia dengan dukungan ekonomi digital. Terdapat 5 pilar ekonomi digital, di mana salah satunya adalah keamanan siber. Fintech dapat mendukung terkait strategi keamanan siber dan manajemen krisis siber seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 47 Tahun 2024; dan OJK bersama BI dapat meningkatkan kerjasama dengan BSSN terkait perlindungan infrastruktur informasi vital untuk sektor keuangan seperti tertuang dalam Perpres No. 82 Tahun 2022.
5. Hasil survei Status Literasi Digital Indonesia di tahun 2022 oleh Kominfo menunjukkan tingkat literasi digital masyarakat Indonesia mencapai 3,54 (*moderate*). Hal ini nampaknya memiliki korelasi dengan hampir 51% masyarakat Indonesia merupakan *millennial* atau Gen Z. Terdapat survei yang menyatakan bahwa semakin tinggi literasi digital maka semakin rendah tingkat pengaduan konsumen kepada pelaku bisnis karena konsumen sudah mengerti terlebih dahulu akan layanan/produk yang akan digunakannya.
6. OJK sudah Menyusun Strategi Nasional Inklusi Keuangan Indonesia 2021-2025 di mana terdapat fokus peningkatan literasi keuangan kepada 10 kategori, termasuk perempuan, kaum disabilitas dan masyarakat desa tertinggal dan terpencil. Selain tantangan geografis, terdapat juga tantangan karakteristik dan itikad. Hal ini seperti ada saja konsumen yang merasa pinjaman merupakan hibah dan tidak perlu dibayarkan kembali.
7. Pentingnya peningkatan kolaborasi dengan regulator dan pelaku industri terkait lainnya untuk memperkuat keamanan siber, perlindungan data pribadi serta literasi digital masyarakat Indonesia.

HARD TALK #2: EMPOWERING THE BACKBONE OF OUR ECONOMY: INCLUSIVE FINANCING FOR MSME'S GROWTH AND RESILIENCE

Moderator Ibu Chrisma Albandjar (Wakil Bendahara II AFTECH) memimpin sesi panel yang membahas penguatan UMKM Indonesia melalui pendanaan inklusif. Berpartisipasi dalam sesi ini adalah Bapak Hanung Harimba Rachman (Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan), Bapak Edi Setijawan (Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK), dan Ibu Vira Widiyarsi (Senior Vice President of Fintech & Payment Tokopedia).



1. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) saat ini melayani 38% segmen UMKM, dengan fokus utama pada segmen yang *underbanked* dan *underserved*. Proses pendanaan melalui LPBBTI lebih sederhana dibandingkan dengan perbankan konvensional, terutama karena menggunakan sistem *credit scoring* yang inovatif. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam LPBBTI untuk mendukung UMKM lebih efektif, seperti menyediakan akses pasar untuk membantu pertumbuhan usaha, memperbaiki administrasi usaha, dan menyediakan asuransi pinjaman.
2. Meskipun bunga pinjaman dari LPBBTI relatif tinggi, tingkat bunga ini harus disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan agar menarik bagi *investor*. Pemerintah dapat memberikan insentif, seperti menggunakan konsep *blended finance*, untuk menyeimbangkan ini. Berdasarkan *roadmap* OJK, LPBBTI diarahkan untuk lebih banyak menyalurkan kredit produktif, dengan harapan tingkat bunga kredit produktif dapat lebih rendah dibandingkan kredit konsumtif.
3. Terdapat kebutuhan untuk pertukaran data yang lebih terbuka antara lembaga pemerintah dan antara lembaga pemerintah dengan pelaku usaha serta penyedia platform. Tujuannya adalah untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif. OJK telah mengembangkan Pusat Data Fintech Lending (PUSDAFIL) dan diharapkan akan ada peningkatan akses data oleh platform LPBBTI pada tahun berikutnya. Selain itu, Kemenkop UKM sedang menyusun *roadmap* Transformasi Digital UMKM yang akan mengatur pertukaran data dari pelaku usaha secara lebih terbuka dan aman.

4. Pemerintah, melalui Kemenkop UKM, sedang mengembangkan program Satu Data yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas. Program ini bertujuan untuk membangun infrastruktur data yang memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efisien dan aman antara pemerintah, pelaku usaha, dan penyedia *platform*. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi pembuatan kebijakan dan strategi yang lebih tepat guna untuk mendukung UMKM.
5. *Platform e-commerce* seperti Tokopedia, yang mayoritas penjualnya adalah UMKM, menggunakan konsep *embedded finance* untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan bekerja sama dengan LPBBTI. Tokopedia mengembangkan sistem penilaian kredit yang berdasarkan data *e-commerce* dan menekankan pentingnya edukasi bagi penjual baru. Langkah-langkah juga diambil untuk melindungi data pribadi, di mana Tokopedia hanya memberikan skor kepada bank, LPBBTI, dan lembaga *multifinance*, serta pemerintah.
6. Akses data ke Pusdafil oleh Platform LPBBTI dan Penyelenggara *Innovative Credit Scoring*.

FINTECH VISIONARY TALK - ENABLING DIGITAL PUBLIC INFRASTRUCTURE TO ACCELERATE FINTECH INNOVATIONS AND ACHIEVE WIDER OUTREACH



Moderator Bapak Raafi Seiff (Direktur Policy+) di sesi ini mengajak Bapak Muhammad Arif (Ketua Umum APJII, Ibu Sati Rasuanto (Co-Founder & President VIDA), dan Ibu Maria Tambunan (Digital Development Specialist World Bank) untuk membahas Digital Public Infrastructure dan berbagai potensi yang dapat dihasilkan di Indonesia

1. Survei tahunan APJII menunjukkan terdapat 215 juta penduduk Indonesia (sekitar 78,1% dari total populasi penduduk) yang merupakan pengguna internet. Adapun ini merupakan kenaikan sebesar 5 juta penduduk dari tahun sebelumnya. Peningkatan paling signifikan dilihat saat masa pandemi COVID-19 (2019-2022) dimana terdapat peningkatan 50 juta penduduk pengguna internet baru. Di Indonesia saat ini terdapat 1012 *Internet Service Provider* (ISP) yang 99% merupakan swasta. Adapun tantangan merupakan infrastruktur digital yang kurang memadai, konektivitas internet yang belum merata terutama di daerah terpencil, serta tingkat literasi digital yang masih rendah.
2. Infrastruktur Digital Publik (IDP) ibarat suatu jalan di mana orang dapat saling berinteraksi dan *unlock* berbagai macam kesempatan dan peluang. IDP memiliki 3 pilar utama, yakni *digital identity*, *data sharing*, dan *payment*. *Digital identity* sangat penting karena memastikan pihak yang masuk ke dalam ekosistem adalah terpercaya melalui verifikasi berdasarkan standar-standar tertentu, sehingga ekosistem tetap aman dan nyaman.
3. Estonia merupakan contoh salah satu negara paling *digitized*. Contoh lainnya adalah Singapura dan India, yang berhasil menerapkan *digital identification* untuk penyaluran Bantuan Sosial (bansos) saat pandemi. Selain itu, masyarakat di kedua negara tersebut dapat mengakses banyak layanan publik dan swasta secara *online*.

4. Ketiga pilar IDP sedang dikembangkan di Indonesia. Sebagai contoh, Kominfo mulai memperkuat *digital ID ecosystem*; Dukcapil mengembangkan identitas kependudukan digital nasional; dan BI memiliki berbagai inisiatif, seperti BI-FAST dan QRIS. Selain itu, KemenPAN RB sedang mendorong inisiatif Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan pendekatan menyeluruh pemerintah untuk transformasi digital. Namun, SPBE dan pengembangan IDP lainnya harus dilaksanakan dengan koordinasi dan kerjasama yang baik antara lembaga pemerintah, agar tidak ada saling tumpang tindih.
5. Memberikan dukungan untuk mendukung perkembangan pilar-pilar IDP di Indonesia melalui peningkatan kerjasama dengan lembaga pemerintah terkait lainnya serta para pelaku industri terkait.

PANEL DISCUSSION: FINTECH ROLE IN AMPLIFYING GOVERNMENT-TO-PERSON INITIATIVES: COLLABORATION, INNOVATION, AND IMPACT

Sesi diskusi panel ini merupakan sesi terakhir dan penutup IFSE 2023. Moderator Ibu Dina Artarini (Chief of Legal and Compliance Officer DANA) mengajak para panelis Bapak Mohammad Rudy Salahuddin (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kemenko Perekonomian), Ibu Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja), dan Bapak Setiaji (Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan Kementerian Kesehatan) bertukar pikiran mengenai bagaimana fintech dapat dimanfaatkan untuk memperkuat inisiatif G2P



1. Berbagai program dan inisiatif Pemerintah sudah semakin baik dan fokus pada peningkatan inklusi keuangan. Perlu peran berbagai *stakeholder* untuk mendorong literasi keuangan digital secara bersama-sama, bersinergi dengan Pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha industri fintech.
2. Program Kartu Prakerja sukses dalam hal tingkat *Interoperability* dalam penyaluran insentif melalui fintech (khususnya penyelenggara *e-wallet*) dan mendorong akuntabilitas melalui penerapan e-KYC.

3. Diperlukan ekosistem digital yang lebih luas, agar pemanfaatan insentif tetap dapat dilakukan di ruang digital (tidak perlu melakukan *cash out*).
4. Beberapa program Kemenkes ke depan melalui pemanfaatan teknologi antara lain program *charity crowdfunding* dengan bekerjasama dengan *platform*, penyusunan *Health Index* untuk dapat menjadi dasar penentuan premi asuransi, dan mempromosikan program menjaga kesehatan (upaya preventif).
5. Penyediaan fasilitas pembiayaan bagi alumni Program Kartu Prakerja oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan suku bunga yang kompetitif.
6. Mengkaji pemanfaatan *Health Index* sebagai salah satu dasar penentuan biaya premi asuransi ke depan.